

Kasus Korupsi Wali Kota Madiun Nonaktif Seret Pemilik Butik

Saksi Beberkan Alur Kartu ATM Milik Maidi

Madiun, Memorandum

Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif Maidi, Kepala DPUPR Thariq Megah, serta Direktur CV Sekar Arum Rochim Ruhdiyanto kembali mengungkap fakta baru.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan 11 saksi di hadapan Majelis Hakim. Mereka adalah Mochamad Munawirul Afkar, mantan *driver* Wali Kota Madiun nonaktif Maidi; Siti Ulfa, Pemilik Butik Ulfa Mumtaza; PNS Direktorat LHK-PN KPK Hanif Lathifatun Nisa; PNS Direktorat LHKPN KPK Abrori Nasrullah; PNS Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Andhina Riskyta Putri; Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperdika Kota Madiun Rizki Adi Hermanto; Karyawan PT Hasta Bangun Nusantara Faturohman; Karyawan PT Hasta Bangun Nusantara Ali Fuad; Karyawan CV Rizqy Agung Heri Kusdiantoro; Direktur CV Hima-wan Jaya Poedji Oetaminingsih; dan Komanditer CV Surya Tama Yesi Dwi.

Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya pada Kamis (6/8),

mantan sopir Maidi, Munawirul Afkar dan pemilik Butik Ulfa Mumtaza, Siti Ulfa memberikan kesaksian.

Irul sapaan Mochamad Munawirul Afkar menjelaskan, bahwa tugas sehari-harinya selama menjadi sopir Maidi pada periode pertama kepe-mimpinannya pada 2019-2023. Utamanya mengantar Maidi untuk urusan kedinasan selama jam kerja.

“Dulu waktu periode pertama, saya sopirnya Pak Maidi. Tahun 2019 sampai 2023. Itu tugas kedinasan. Mengantar tugas-tugas dinas,” katanya.

Selain mengantar pada jam kerja, Irul mengakui pernah mengantar terdakwa Maidi di luar jam kerja. Pun dimintai tolong mengantar maupun mengambil barang. Bahkan, Irul memberikan pengakuan pernah mengantar dan mengambil kar-tu ATM milik terdakwa Maidi ke Butik Ulfa Mumtaza.



Sejumlah saksi dimintai keterangannya dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (6/8).

Dia mengonfirmasi permin-taan itu terjadi pada pertengahan 2023 di rumah dinas wali kota. Sempat diambil kembali saat menjelang jabatan wali kota pada periode pertama berakhir, kartu ATM kembali diberikan ke Ulfa pada 2025 ketika dipanggil terdakwa Maidi saat berada di TPA Winongo.

“Pernah diutus mengantar sesuatu amplop di dalam map. Terus saya antar ke butik. Dua

kali mengantar dan ambil satu kali,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Irul juga mengungkap terkait aset milik Maidi. Di antaranya, hotel, ken-daraan pribadi, rumah di Jalan Merpati, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo dan lahan di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

“Aset kendaraan setahu saya Nissan Grand Livina, Daihatsu

digunakan untuk pembayaran pesanan suplemen kesehatan Utsukushhii senilai jutaan ru-piah serta pemeriksaan gigi di klinik milik suaminya.

“Di dalam amplop ada kartu ATM sama nomor PIN. Ketika ada pembelian baju, suplemen itu pembayaran dengan kartu ATM itu. Kartu ATM kosong, diisi ketika ada pembelian,” terang Ulfa.

Ulfa menyatakan bahwa beberapa kali pernah membelikan baju untuk terdakwa Maidi saat di luar kota maupun luar negeri. Harga baju kisaran Rp2 juta hing-ga Rp 12 juta. Tidak jarang Ulfa membelikan baju menggunakan uang pribadi terlebih dulu.

“Pernah membelikan baju tidak ada uangnya (kartu ATM). Pakai uang saya. Dikembalikan lewat kartu ATM. Pembelian tidak tentu,” ujarnya.

Ulfa menyebut kartu ATM sempat diminta dan dikemba-likan menjelang akhir jabatan periode pertama kepada terdakwa Maidi lewat Irul. Kemudian diterima lagi dari Irul pada 2025. Pada 2026, kartu ATM tersebut diminta dan diberikan ke Faizal Rahman.

“Mas Faizal disuruh Mas

Hendra (anak terdakwa Maidi) untuk mengambil kartu ATM. Tidak ada saldonya, sudah lama tidak ada saldonya,” beber Ulfa.

Di sisi lain, Ulfa menegaskan tidak pernah mendapat peker-jaan proyek di Pemkot Madiun. Namun, dia mengakui bahwa anaknya, Amel Zahro melalui CV Duta Mandiri pernah mendapat pekerjaan berupa paket proyek penunjukan langsung (PL) di DPUPR. “Betul,” singkatnya.

Menanggapi kesaksian sak-si, penasihat hukum terdakwa Maidi memberikan sejumlah pertanyaan mengenai latar belakang profesi Siti Ulfa sebagai fashion designer. Selain itu, juga ditanyakan apakah ada pejabat, artis, influencer memesan baju di Ulfa Mumtaza. “Ada. Luma-yan (banyak),” jawab Ulfa.

Selain penasihat hukum, Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar ikut memberikan perta-nyaan kepada saksi Ulfa.

“Izin menyambung dari advokat ya, apakah ada juga yang ‘bapak-bapak’ lainnya memesan kepada saudara (saksi Ulfa),” tanya Ketua Majelis Ha-kim Ernawati Anwar.

Kemudian dijawab saksi Ulfa. ‘Ada,’ jawab Ulfa. (ggi/nov)

DPRD Kota Madiun Soroti Kapasitas TPA Winongo

Madiun, Memorandum

Kondisi kapasitas TPA Wi-nongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga dua bulan ke depan.

Menanggapi itu, DPRD Kota Madiun meminta Pemkot Madiun segera melakukan langkah cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.



Ketua DPRD Kota Madiun Armaya

“Program pengelolaan sam-pah menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Madiun. Kare-na itu kami menghadirkan DLH untuk memberikan sosialisasi sekaligus praktik pengelolaan sampah rumah tangga,” kata Ketua DPRD Kota Madiun Ar-maya, Jumat (7/8).

Menurut Yayak, sapaan ak-rabnya, kondisi TPA yang sema-kin terbatas membuat pengu-rangan volume sampah tidak bisa ditunda. Saat ini, sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 120 ton per hari.

Bahkan, apabila ada momen tertentu seperti karnaval mau-pun event yang diselenggarakan pemkot dengan mengundang banyak massa besar bisa me-ningkat hingga 130-140 ton.

Armaya berharap gerak-an memilah sampah mampu menekan timbunan sampah hingga 20 persen sehingga usia tampung TPA dapat diperpan-jang.

“Kalau program ini ber-jalan, volume sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang. Dampaknya, kapasitas penam-pungan akan lebih panjang,” ujarnya.

Politikus Partai Perindo itu menyebut hasil sosialisasi be-rsama DLH akan menjadi ba-han evaluasi dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah ke depan. Termasuk rencana pengadaan sarana prasarana lain yang dibutuhkan untuk

mendukung program *Zero Was-te 2027*.

“Persoalan (penangan-an) sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, te-tapi membutuhkan keterlibatan masyarakat,” tuturnya.

Pihaknya juga memastikan fungsi pengawasan terhadap program persampahan akan diperkuat. Hal itu dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan pemkot dan disetujui DPRD benar-benar memberi-kan dampak terhadap penge-lolaan sampah di Kota Madiun.

“Kami akan memaksimal-kan fungsi pengawasan agar anggaran yang sudah dialokasi-kan benar-benar menghasilkan program yang efektif dan ber-dampak,” tegas Armaya.

Tahun ini, anggaran sekitar Rp 30 miliar telah dikelola oleh DLH. Angka tersebut berpotensi ditambah tahun depan demi memaksimalkan program pe-ngelolaan sampah termasuk demi mewujudkan *Zero Waste 2027*.

“Alokasi anggaran tahun depan untuk DLH sudah pasti ditambah. Dalam KUA-PPAS juga sudah dicantumkan. Ting-gal nanti peruntukannya untuk apa saja akan dibahas lebih lanjut,” pungkasnya. (ggi/nov)

Bengawan Solo Tercemar Limbah Pabrik Gula dan Tekstil

Ngawi, Memorandum

Bengawan Solo yang melau-ri wilayah Kabupaten Ngawi diduga tercemar limbah pabrik.

Pasalnya, warna air sungai tersebut terlihat berwarna hitam pekat. “Beberapa waktu lalu sudah diambil sample untuk diuji laboratorium,” kata Ice Wijayanti, Pengelola Data dan Infomasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi.

Ice menjelaskan, bahwa hasil pengambilan sampel air Bengawan Solo yang dilakukan oleh tim DLH bersama petugas sampling PT Mitralab Buana



Petugas saat mengambil sampel air Bengawan Solo.

Surabaya pada 15 Juli lalu masih memenuhi baku mutu untuk parameter warna yang ditentu-kan.

“Meski berwarna hitam pe-kat, namun hasil uji lab untuk parameter warna hasilnya 39. Artinya masih aman, karena maksimal nilai batas bakunya 50,” jelasnya.

Ia menuturkan, penye-babnya hitam pekat air be-ngawan tersebut karena ada-nya pencemaran limbah dari daerah lain sebelum masuk di Kabupaten Ngawi seperti Sragen, Karanganyar maupun

Sukoharjo, Jawa Tengah. “Du-gaan sementara dari pabrik tekstil dan pabrik gula. Nanti

akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Ditambahkan, sejauh ini

Pemkab Ngawi Usulkan Pembangunan Sumur Bor lewat BNPB Pusat

Ngawi, Memorandum

Pemkab Ngawi melalui Di-nas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengusulkan pembangunan sumur bor ke Badan Nasio-nal Penanggulangan Bencana (BNPB) pusat.

Hal itu sebagai langkah stra-tegis dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih pada musim kemarau.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi

Pipit Dwi Herlina menjelaskan, musim kemarau yang terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi membuat banyak warga yang mengalami kekurangan air ber-sih.

Mendasar itu, Pemkab Ng-awi mengusulkan permohonan bantuan dana siap pakai untuk pembangunan sumur bor ke-pada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penangu-langan Bencana (BNPB) pusat.

“Tahun ini kami mengusulkan

11 titik di wilayah Ngawi untuk pembangunan sumur bor,” katanya.

Pipit menyampaikan, adapun 11 titik tersebut meliputi Desa Widodaren, Desa Sido-makmur, dan Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren; Desa Kerek Kecamatan Ngawi; Desa Kenongorejo dan Desa Bringin, Kecamatan Bringin.

Kemudian Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar; Desa Mantingan dan Desa Jati-

Pemkab Madiun Rehabilitasi Eks Rumah Kadinkes

Madiun, Memorandum

Pemkab Madiun melalui Di-nas Pekerjaan Umum dan Pe-nataan Ruang (DPUPR) sedang mempersiapkan proyek rehabi-litasi eks rumah dinas (rumdin) kepala dinas kesehatan (kadinkes) di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun.

Langkah ini diambil guna mempercantik kawasan sekaligus meningkatkan nilai guna aset pemkab agar lebih menarik minat pihak ketiga atau investor.

Saat dikonfirmasi mengenai progres proyek tersebut, Kepala DPUPR Kabupaten Madiun Bobby Saktia Putra Lubis, mengatakan bahwa proses pengadaan saat ini telah memasuki tahap akhir pelelangan.

“Kalau melihat jadwal di *we-bsite*, saat ini sudah masuk tahap pemberian Surat Penunjukan. Rencananya minggu depan su-dah proses penandatanganan kontrak,” ujar Bobby, Jumat (7/8).



Eks Rumdin Kadinkes di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun yang bakal mendapatkan rehabilitasi.

Ia menambahkan, pagu an-ggaran yang disiapkan untuk pro-yek rehabilitasi ini awalnya men-capai Rp 679 juta. Namun, dari hasil proses lelang, pemenang tender mengajukan penawaran di angka Rp 567 juta.

Dengan cakupan pekerjaan bangunan yang rusak dan perba-ikan daun pintu serta jendela. “Ni-lai penawarannya turun lumayan jauh, hampir 20 persen dari nilai

Dari satu hektare tanaman padi-na, separo lahan terserang hama wereng dan virus pengganggu tanaman. Ia pun terpaksa mela-kukan pembabatan agar hama tidak meluas ke tanaman lainnya.

“Di daerah sini banyak yang terserang hama wereng juga, ini mulai menyerang tanaman usia 20 hari, sudah dilakukan pengo-batan rutin 5 sampai seminggu sekali tapi tidak membaik, sudah habis biaya Rp 3 juta untuk peng-obatan werengnya,” katanya.

“Kalau biasanya lahan satu hektare ini bisa panen 8 ton, se-karang ini sudah mati tidak bisa panen jadi sekalian saja saya babat dan tunggu musim tanam selanjutnya,” imbuh Sugeng. (aji/nov)

Petani Madiun Rugi gegara Serangan Hama Wereng

Madiun, Memorandum

Sebagian petani di Kabupa-ten Madiun harus gigit jari. Itu setelah tanaman padi yang baru dua bulan ditanam terpaksa dibabat lebih awal dan otomatis mengalami gagal panen lantaran rusak dan mati akibat diserang hama wereng.

Suyadi, petani asal Desa Pa-cinan, Kecamatan Balerejo salah seorang korbannya. Lahan padi seluas setengah hektare miliknya dipastikan gagal panen setelah semua tanaman mengering dan mati usai diserang hama wereng sejak usia 20 hari.

“Sudah dilakukan berbagai upaya pengobatan, sampai saya habis biaya Rp 1,5 juta tapi tetap



Petani di Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo terpaksa memangkas dini tanaman padinya lantaran diserang hama wereng.

tidak membuahkan hasil, mati semua,” ungkapnya.

Suyadi mengaku mengalami

kerugian besar di musim tanam kali ini. Dengan luas lahan sete-ngah hektare tersebut biasanya da-

pat memperoleh panen sebesar 8-ton gabah, kini hasilnya dipastikan nihil. Kendati mengalami kerugian besar, ia tetap akan menanam padi di musim tanam selanjutnya.

“Ini sama sekali tidak bisa dipanen, terpaksa didiamkan di-keringan dulu agar siklus hama werengnya selesai, baru nanti sambil tunggu yang lain panen bulan November akan kami ta-nami lagi padi,” terangnya.

“Kalau untuk bantuan dari pe-merintah sejauh ini belum ada, ha-rapannya tentu ada perhatian dari dinas terkait baik berupa bantuan bibit, pupuk maupun obat-obatan untuk hama padi,” imbuh Suyadi.

Hal serupa juga dialami Su-geng, petani lain didesa tersebut.